

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

*Good Corporate Governance* (GCG) di berbagai sektor saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi Perusahaan. GCG diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, seluruh infrastruktur GCG mulai dari Dewan Komisaris, komite di bawah Dewan Komisaris, sampai dengan Direksi dan jajaran Manajemen harus melaksanakan GCG dengan penuh komitmen agar tercapainya tujuan perusahaan dengan baik (Zarkasyi, 2008).

Perhatian terhadap praktik *corporate governance* (CG) pada perusahaan telah meningkat dalam dasawarsa terakhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Enron Corporation dan Worldcom. Masalah utama dalam pelaksanaan CG timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dari pengendalian dalam perusahaan yang modern (Balafif, dalam Maharani 2010).

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah syarat-syarat pelaksanaan sistem dalam suatu perusahaan dimana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dapat memastikan pihak manajer dan pihak internal perusahaan lainnya dapat memenuhi kepentingan stakeholder (Sanda *et al*, dalam Markali 2010).

GCG merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholder*. Pelaksanaan GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Citra, 2013). Mekanisme *corporate governance* dan pengawasan diperlukan diperlukan untuk mengurangi ketidak efisienan yang timbul dari bahaya moral dan pilihan-pilihan buruk (Linda, 2012). Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu *transparansi, akuntabilitas, independensi* serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang pelaksanaan GCG perlu ditandai oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan (Zarkasyi, 2008).

Merebaknya tuntutan terwujudnya GCG tersebut, kini profesi akuntan banyak mendapat sorotan. Sorotan tersebut terutama terkait dengan peranan profesi akuntan selama ini ikut serta mewujudkan *good governance* tersebut. Akan tetapi selama ini masih sedikit bukti yang mengaitkan antara sistem

GCG dengan informasi akuntansi keuangan, yang merupakan output dari sistem tersebut. Struktur entitas bisnis yang dimodifikasi sedemikian rupa, guna menjebatani sekaligus mempertemukan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda asal dan motivasinya. Namun dalam tataran implementasi yang diperlukan bukan sekedar penyempurnaan regulasi, pembenahan infrastruktur dan komisaris independen atau komite audit, sangat penting memperhatikan pemahaman sekaligus ketegasan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam implementasinya, untuk secara sungguh-sungguh mempraktekan GCG (Zarkasyi, 2008).

Salah satu aspek penting dalam GCG adalah pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal perusahaan. Dalam *intra-Non-Big 4 Auditor Quality*, (Ross D. Fuerman dan Michael Kraten, dalam Maharani 2012) mengkaji mutu audit kantor-kantor akuntan yang tidak termasuk *Big 4*. Seperti kajian mengenai solo *auditors Fuerman* melihat adanya beberapa pasar jasa audit yang dilayani *non Big 4* (Tuanakotta, 2011). Belajar dari kasus Enron dan kasus yang terjadi di Indonesia, pemilihan KAP yang tepat sangatlah diperlukan. Komite Audit sebagai pihak yang akan melakukan review proses pemilihan dan penunjukan KAP perlu dibekali pengetahuan secara mendalam. Demikian juga organ lain, mulai dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Mereka harus mengetahui KAP yang tepat dan terbaik. Sebab pemilihan KAP yang tepat akan meningkatkan citra perusahaan. Mekanisme GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai

tambah (*value added*), sehingga diyakini memiliki hubungan terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas.

Perhatian terhadap praktik *corporate governance* (CG) pada perusahaan telah meningkat dalam dasawarsa terakhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti *Enron Corporation* dan *Worldcom*. Masalah utama dalam pelaksanaan CG timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dari pengendalian dalam perusahaan yang modern (Balafif, dalam Maharani 2012). Permasalahan ini meningkat seiring dengan perusahaan melakukan penawaran umum perdana di bursa saham yang akan memisahkan fungsi pengurus dan fungsi pemilik. Dalam praktik, akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan imbal balik yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). Zhuang et al dalam Maharani, 2012 menyatakan masalah keagenan tidak hanya terjadi antara pemegang saham dan manajer, tetapi juga di antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dan kreditur, serta antara pemegang saham pengendali dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk para pemasok dan para pekerja. Suatu mekanisme CG yang baik diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan di perusahaan.

Salah satu cara yang ditempuh untuk menciptakan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan informasi yang dimiliki mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan keuangan tahunan dengan tingkat keandalan yang dapat dipercaya. Adapun cara untuk mempertahankan tingkat keandalan dari laporan tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan jasa audit atas laporan keuangan. Auditor akan melaksanakan fungsi pengawasan serta menguji kredibilitas dari informasi akuntansi yang disediakan oleh manajemen (Abdel-khalik, Asbaugh & Warfield, dalam Maharani 2012).

Banyaknya kantor akuntan publik yang terdapat di Indonesia, dengan variasi sumber daya yang mereka miliki, memungkinkan mereka menyediakan kualitas audit yang beragam. Kualitas audit merupakan faktor yang sangat sulit untuk diukur secara langsung. Salah satu proksi yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik (DeAngelo, Palmrose, dalam Maharani 2012). Semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik (diproksikan dengan jumlah pendapatan), maka akan lebih baik pula kualitas audit yang disediakan oleh kantor akuntan publik tersebut. (Lin dan Liu dalam Maharani 2012) menemukan bahwa perusahaan dengan tata kelola mekanisme internal yang lemah cenderung memilih auditor dengan kualitas yang rendah. Hal ini dilakukan agar pemilik utama perusahaan mampu mempertahankan keuntungan yang didapatkan melalui lemahnya transparansi keuangan perusahaan. Di sisi lain, dengan perbaikan tata kelola perusahaan, perusahaan akan memiliki kemungkinan

yang lebih besar untuk menunjuk auditor yang besar dengan asumsi mereka mampu memberikan kualitas jasa audit yang tinggi.

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik, semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Sehingga pergantian auditor dimungkinkan terjadi dengan beberapa pertimbangan perusahaan dan pengaruh eksternal lainnya.

Manajemen didalam perusahaan ingin menyampaikan informasi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang berasal dari pihak lain kepada pihak di luar perusahaan yang ingin memperoleh informasi yang dapat dipercaya keandalannya. Adanya dua kepentingan yang biasanya berlawanan antara manajemen dan pemilik modal inilah yang menyebabkan timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik. Dengan banyaknya KAP yang ada saat ini, perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **“ANALISIS MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN TERHADAP PEMILIHAN AUDITOR EKSTERNAL”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Desti Maharani, (2012) dari Universitas Indonesia. Bedanya dengan penelitian ini terletak pada

jangka waktu periode pada penelitian terdahulu pada tahun 2009-2010, sedangkan penelitian ini periodenya pada tahun 2011-2013, dan ditambah variabel independen mulai dari komisaris independen, Kepemilikan saham manajerial karena tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, sangat berpengaruh dalam pemilihan auditor *eksternal* (Suwandari, 2013).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pememilih auditor Top 10.
2. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Top 10.
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor top 10.
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Top 10.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mekanisme CG suatu perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternalnya. Penelitian ini berfokus pada empat mekanisme internal CG perusahaan, yaitu Ukuran dewan komisaris, efektivitas komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajemen, serta diharapkan memberikan kontribusi terhadap

penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memilih auditor eksternal.

#### **D. MOTIVASI PENELITIAN**

1. Untuk membandingkan hasil penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Masih sedikit penelitian yang meneliti tentang Analisis Mekanisme *Corporate Governance* perusahaan terhadap Pemilihan Auditor Eksternal.
3. Perkembangan seorang Auditor yang semakin banyak di Indonesia.

#### **E. MANFAT PENELITIAN**

1. Bagi Akademisi:
  - a) Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pememilih auditor Top 10.
  - b) Untuk mengetahui apakah efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Top 10.
  - c) Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor top 10.
  - d) Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor Top 10.



## 2. Bidang Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor maupun kantor akuntan publik guna mengembangkan usaha sesuai dengan tujuannya.